

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi basis utama aktivitas ekonomi masyarakat. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta menggerakkan perekonomian lokal. Namun demikian, kondisi UMKM di wilayah pedesaan hingga saat ini masih didominasi oleh usaha berskala mikro dengan tingkat produktivitas dan daya saing yang relatif rendah. Sebagian besar UMKM pedesaan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dan belum mampu berkembang ke pasar yang lebih luas.

Rendahnya daya saing UMKM pedesaan juga tercermin dari masih minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Menurut Kompasiana (2023) baru sekitar 30% UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam proses produksi dan pemasaran, sementara sisanya yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan masih menjalankan usaha secara konvensional. Kondisi ini menyebabkan UMKM pedesaan memiliki keterbatasan dalam memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta bersaing dengan produk dari luar daerah.

Selain itu, sebagian besar UMKM pedesaan masih menghadapi keterbatasan dari sisi permodalan, kemampuan manajerial, serta inovasi produk. Usaha yang dijalankan umumnya bersifat turun-temurun, dengan pengelolaan yang sederhana dan belum didukung oleh perencanaan usaha yang matang. Akibatnya, banyak UMKM pedesaan sulit meningkatkan skala usaha dan cenderung bertahan pada kondisi usaha yang stagnan.

Meskipun memiliki potensi besar, daya saing UMKM di pedesaan masih menghadapi tantangan kompleks seperti keterbatasan modal, rendahnya keterampilan manajerial, minimnya literasi digital, serta keterbatasan akses pasar yang membuat usaha sulit berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat (Siregar & Jaffisa, 2020). Kemampuan UMKM untuk bertahan dan berkembang

sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran (Bumulo & Hunto, 2024). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator dalam mendorong penguatan dan pengembangan UMKM pedesaan agar mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Di lapangan, hambatan tersebut sering mengakibatkan rendahnya inovasi, sulitnya memperluas pasar, dan terbatasnya efisiensi produksi. Infrastruktur penunjang seperti sentra produksi, akses logistik, dan fasilitas pelatihan di banyak daerah masih memerlukan pemyesuaian. Padahal, pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu faktor kunci di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan daya saing produk (Agustin, 2023).

Berbagai pihak telah melakukan upaya untuk memperkuat UMKM, termasuk keterlibatan komunitas eksternal seperti Komunitas Djarum 76 yang aktif di sejumlah daerah. Komunitas ini dikenal melalui program pelatihan kewirausahaan, kampanye digitalisasi, dan promosi produk melalui event-event ekonomi kreatif (Asnuryati, 2023). Meskipun kontribusinya selama ini banyak diarahkan pada pengembangan pariwisata dan event budaya (Fatwa & Rasid, 2023).

Hal ini terlihat nyata di Desa Pulung, di mana Pemerintah Desa dan Komunitas Djarum 76 membangun kemitraan yang menghasilkan beragam program seperti pelatihan manajemen usaha, pendampingan produksi, pengemasan produk, promosi bersama, hingga pemanfaatan media digital untuk pemasaran. Berkat kolaborasi ini, UMKM di Desa Pulung menunjukkan penguatan yang signifikan, kapasitas produksi meningkat, kualitas produk lebih terstandar, jaringan pemasaran meluas, dan kepercayaan diri pelaku usaha dalam bersaing semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh Syahputra (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan Komunitas Djarum 76, melalui Djarum Foundation, terbukti efektif dalam mendukung pembangunan berbasis lokal. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai program, seperti bantuan dana, pelatihan sumber daya manusia, serta kegiatan non-materi

lainnya. Model kolaborasi ini membuktikan bahwa peran komunitas eksternal seperti Djarum 76 dapat dioptimalkan tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga untuk pengembangan sektor lain yang strategis, seperti UMKM lokal di wilayah pedesaan. Namun, fokus penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengulas dampaknya terhadap penguatan UMKM di tingkat desa.

Program CSR Djarum Foundation sebagai pelaksana utama kegiatan sosial PT Djarum terbukti memberikan kontribusi konkret dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya tampak pada pengembangan industri Batik Kudus, di mana Djarum Foundation rutin menyelenggarakan pelatihan, pendampingan usaha, serta promosi produk yang berorientasi pada kemandirian ekonomi pelaku usaha lokal (Ratnawati, 2019). Hal ini memperkuat bukti bahwa komunitas eksternal dapat menjadi mitra strategis dalam peningkatan daya saing UMKM melalui pendekatan kolaboratif yang terstruktur. Namun, penelitian ini masih terbatas pada sektor batik di Kudus dan belum mengkaji peran pemerintah desa dalam kolaborasi CSR untuk pemberdayaan UMKM di sektor dan wilayah lain.

Pemerintah desa sendiri memiliki peran krusial dalam menjembatani kolaborasi dengan mitra eksternal seperti Komunitas Djarum 76, terutama dalam rangka penguatan daya saing UMKM lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2019), Djarum Foundation dibentuk sebagai wujud nyata dari komitmen “Bakti Pada Negeri” yang mencakup bidang sosial, pendidikan, budaya, hingga ekonomi masyarakat. Melalui kerja sama yang tepat, kolaborasi ini berpotensi menjadi solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi UMKM desa, seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana produksi, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Namun, penelitian ini belum secara mendalam membahas bagaimana pemerintah desa mengelola kemitraan ini secara strategis dalam konteks pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini diambil untuk mengisi kekosongan kajian mengenai strategi yang dijalankan dan hasil yang dicapai dari kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas eksternal dalam mendukung

penguatan UMKM. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik kolaboratif yang berhasil, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi pengembangan kemitraan serupa di wilayah lain.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi kolaboratif antara Pemerintah Desa Pulung dan komunitas Djarum 76 dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal, baik dari segi kapasitas produksi, pemasaran, maupun akses jejaring ekonomi yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan model kemitraan yang aplikatif dan dapat direplikasi oleh desa-desa lain, serta memperkaya kajian teoritis mengenai collaborative governance dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis desa.

Penelitian ini berlokasi di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena di wilayah tersebut komunitas sosial Djarum 76 ada di setiap dusun dan aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal dan kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Desa Pulung menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana sinergi antara pemerintah desa dan komunitas dapat dioptimalkan dalam meningkatkan daya saing UMKM secara konkret.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana strategi kolaboratif antara Pemerintah Desa Pulung dan Komunitas Djarum 76 dijalankan serta sejauh mana dampaknya terhadap penguatan UMKM lokal. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang telah atau dapat terjalin, peran masing-masing aktor dalam proses kolaboratif tersebut, serta dampaknya terhadap penguatan kapasitas dan keberlanjutan UMKM di tingkat desa.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Desa Pulung dan komunitas Djarum 76, menganalisis peran masing-masing pihak dalam mendukung pengembangan UMKM, serta mengevaluasi dampak kolaborasi tersebut terhadap peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, dan daya saing UMKM lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi strategis untuk pengembangan kemitraan yang lebih optimal di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa pulung dalam mendorong kolaborasi dengan komunitas Djarum 76 untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa pulung dalam mendorong kolaborasi dengan komunitas Djarum 76 untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai sumber literatur maupun informasi bagi para pendidik, mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak terkait yang ingin mempelajari tentang Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Kolaborasi dengan Komunitas swasta seperti Djarum 76.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa dan Komunitas Djarum 76, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan masukan strategis dalam meningkatkan

kolaborasi untuk mendukung pemberdayaan UMKM lokal agar lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

E. Definisi Operasional

1. Peran Pemerintah Desa

Peran Pemerintah Desa dalam penelitian ini dipahami sebagai fungsi, tindakan, dan tanggung jawab Pemerintah Desa Pulung dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan ekonomi desa melalui kerja sama lintas sektor. Peran ini mencakup fungsi sebagai fasilitator, koordinator, inovator, dan penghubung dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) untuk penguatan UMKM lokal.

Menurut teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), pemerintah dalam konteks kolaboratif harus mampu membangun forum dialog, menyelaraskan kepentingan antar aktor, serta mengelola dinamika hubungan antar pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa juga mencakup penyediaan regulasi atau kebijakan desa yang mendukung UMKM, alokasi anggaran dari dana desa untuk kegiatan produktif, serta pembentukan forum UMKM sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku usaha lokal. Peran tersebut diukur melalui indikator keterlibatan pemerintah dalam perencanaan program, dukungan kebijakan, fasilitasi pelatihan, serta kapasitas pemerintah dalam membangun jejaring kolaboratif lintas sektor.

2. Kolaborasi dengan Komunitas Djarum 76

Kolaborasi dengan Komunitas Djarum 76 dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai bentuk kerja sama terstruktur dan saling menguntungkan antara Pemerintah Desa Pulung dan Komunitas Djarum 76 dalam upaya mendukung pengembangan UMKM. Kolaborasi ini didasarkan pada prinsip partnership yaitu kerja sama sukarela antar organisasi dari sektor publik, swasta, dan masyarakat yang dibangun atas dasar kesetaraan, saling percaya, dan tujuan bersama.

Dalam penelitian ini, kolaborasi diukur melalui beberapa dimensi penting: (1) kesamaan visi dan misi antar aktor; (2) keterlibatan komunitas dalam perencanaan

dan pelaksanaan program UMKM; (3) alokasi sumber daya bersama (dana, fasilitas, tenaga ahli); dan (4) tingkat ketercapaian tujuan kolaboratif. Mengacu pada Fatwa & Rasid (2023) dan Syahputra (2023), kolaborasi yang efektif ditandai dengan komunikasi intensif, pembagian peran yang jelas, adanya monitoring bersama, serta kontinuitas hubungan antarlembaga.

Dalam konteks ini, Komunitas Djarum 76 tidak hanya berperan sebagai sponsor kegiatan, tetapi juga mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti melalui pelatihan kewirausahaan, branding produk UMKM, serta dukungan promosi dalam jejaring yang lebih luas.

3. Daya Saing UMKM Lokal

Daya saing UMKM lokal dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan UMKM di Desa Pulung untuk bertahan, tumbuh, dan bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global dengan mengandalkan inovasi, kualitas produk, teknologi, dan efisiensi produksi. Teori dari Tambunan (2020) menekankan bahwa daya saing UMKM ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta kemampuan inovatif.

Selain itu, daya saing juga dilihat sebagai hasil dari keberhasilan membangun kolaborasi eksternal dan dukungan ekosistem usaha yang kondusif. Dalam kerangka ini, indikator operasional daya saing meliputi: peningkatan kapasitas produksi, kualitas dan diferensiasi produk, perluasan jaringan pemasaran (termasuk digital marketing), peningkatan omzet, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Ratnawati (2019) juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Oleh karena itu, daya saing dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari kinerja ekonomi UMKM, tetapi juga dari keberhasilan dalam menjalin kemitraan strategis dan memanfaatkan peluang kolaborasi.